

**RENCANA KERJA
TAHUN 2020
HASIL VERIFIKASI**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT
2019**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmat Nya penyusunan Rencana Kerja 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

Rencana Kerja tahun 2020 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat. Renja tahun 2020 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif. Semoga dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja 2020, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2020 ini belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Renja ini.

Bandung, Agustus 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat



HERI SUHERMAN, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198603 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra OPD	6
Hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019	8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra KPID s/d tahun 2019 (Tahun berjalan)	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	19
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	19
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	22
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	27
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	29
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV : PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun

Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2020;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2020 bagi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD Tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2020, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, Serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa; Dan
3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2018 (n-2) ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sendiri baru terbentuk pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 6 program dan 29 kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2018 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2019 sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019.

Tabel T-II.1
Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra DISDUKCAPIL s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*
Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	WAJIB										
	Adminduk dan Capil										
	PROGRAM PENATAAN DATA KEPENDUDUKAN	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	84,78%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Pembinaan dan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	656 Orang	NA	NA	NA	NA	108 Orang	108 Orang	16,46%	
	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Jumlah Elemen Data yang disinkronkan	32 Data	NA	NA	NA	NA	32 Data	32 Data	100%	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Monitoring dan Evaluasi PIAK	Jumlah Elemen Data yang disinkronkan	2 Elemen	NA	NA	NA	NA	2 Elemen	2 Elemen	100%	

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	84,28%	NA	NA	NA	NA	81,12%	82,50%	101,70%	Disdukcapil
	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah elemen pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32 Elemen	NA	NA	NA	NA	32 Elemen	32 Elemen	100%	Disdukcapil

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	PROGRAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disdukcapil
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja sama pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	25 PKS	NA	NA	NA	NA	5 PKS	15 PKS	15 PKS	Disdukcapil

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota	Jumlah Inovasi pelayanan Kab/Kota	4 Inovasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disdukcipil
	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan aparatur pencatatan sipil	982 Orang	NA	NA	NA	NA	160	160	16,29	Disdukcipil

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Rens tra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Pembinaan aparatur Pendaftaran Penduduk	982 Orang	NA	NA	NA	NA	160	160	16,29	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	984 Orang	NA	NA	NA	NA	162	162	16,49	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Rens tra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Monitoring dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah elemen layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	23 Elemen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disdukcapil
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
	Penyediaan Langganan Kantor	Terselenggaranya Langganan Internet, Surat Kabar dan TV Berbayar, Langganan Tanaman dan Pewangi Ruangan	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor	Tersedianya Makanan dan Minum Rapat, Tamu, Lembur dan Air Galon Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil
	Penyediaan sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Tersedianya jasa kantor, Sewa, Publikasi, Dokumentasi	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil
	Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis	Tersedianya ATK, Cetak, Fotocopy dan Penggandaan, Cinderamata	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Tenaga Jasa Keamanan, Tenaga Kebersihan, Non PNS tenaga Teknis.	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Rens tra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional dan perpanjangan STNK	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil
	Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Tanaman, Pemeliharaan Jaringan dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil
	Penyediaan Tenaga Ahli kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpenuhinya kegiatan kerohanian dan peningkatan jasmani	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil
	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Terselenggaranya Bimbingan Teknis, Diklat dan Kursus	60 bln	NA	NA	NA	NA	12	12	20%	Disdukcapil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2018 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2019 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan/n-1)		SKPD Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
		Singkat (Diklat dan Outbond)									
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	5 Kegiatan	NA	NA	NA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%	Disdukcapil
		Pembangunan tembok penahan tanah	Tembok gedung yang representatif	1 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Disdukcapil

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Akurasi Data Kependudukan di Jawa Barat.
2. Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pemanfaatan Data Kependudukan.
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2019 (n-1) dan untuk tahun n-2 (2018) hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel II.2.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el)

2. Akurasi data kependudukan di Jawa Barat yang masih harus ditingkatkan. masih cukup tinggi jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.
3. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Dukcapil Provinsi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah.
4. Terlambatnya pengiriman blangko KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri
5. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran.
6. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta capil masih rendah
7. Kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan masih rendah;
8. Sarana dan Prasarana kerja yang terbatas.

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Barat berdasarkan satu nama satu data kependudukan.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Indeks Reformasi Birokrasi yang rendah	Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Akurasi data kependudukan . - Tingkat penyelenggaraan pelayanan Administrasi kependudukan belum optimal - Tingkat Pemanfaatan data kependudukan yang masih rendah - Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan masih di bawah target

Tabel T-II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n- 1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi				NA	80%	81,23%	82,35%	NA	NA	NA	NA	
	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				NA	81,12%	81,83%	82,63%	NA	82,50%	83,27	83,98	
	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi				NA	50%	62,5%	75%	NA	NA	NA	NA	
	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil				NA	80%	80,80%	81,60%	NA	NA	NA	NA	

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel. T-II.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020

Nama OPD : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bandung	Jumlah elemen pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32 Elemen	4,142,684,000	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bandung	Jumlah elemen pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32 Elemen	4,142,684,000	
2	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Bandung	Jumlah aparatur yang mengikuti Rakornis, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion lingkup pendaftaran penduduk	178 Orang	180.000.000	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Bandung	Jumlah aparatur yang mengikuti Rakornis, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion lingkup pendaftaran penduduk	178 Orang	180.000.000	
3	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Bandung	Jumlah aparatur yang mengikuti Rakornis, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion lingkup pencatatan sipil	178 Orang	184.963.500	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Bandung	Jumlah aparatur yang mengikuti Rakornis, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion lingkup pencatatan sipil	178 Orang	184.963.500	
4	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti Sos	178 Orang	275.492.826	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti Sos	178 Orang	275.492.826	

	an Pencatatan Sipil		ialisasi, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			n dan Pencatatan Sipil		ialisasi, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			
5	Monitoring dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Jumlah elemen layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	32 Elemen	99.997.000	Monitoring dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Jumlah elemen layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	32 Elemen	99.997.000	
6	Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bandung	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118 Orang	200.000.000	Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bandung	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	118 Orang	200.000.000	
7	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Bandung	Jumlah Elemen Data yang disinkronkan	32 Data	263.729.600	Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Bandung	Jumlah Elemen Data yang disinkronkan	32 Data	263.729.600	
8	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Jawa Barat	Jumlah Elemen Pengelolaan Data Kependudukan dan Elemen Pemanfaatan data Kependudukan yang dimonitoring	2 Elemen	110.000.000	Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Jawa Barat	Jumlah Elemen Pengelolaan Data Kependudukan dan Elemen Pemanfaatan data Kependudukan yang dimonitoring	2 Elemen	110.000.000	
9	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	5 PKS	150.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	5 PKS	150.000.000	
10	Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota	Jawa Barat	Jumlah Inovasi pelayanan Kab/Kota	1 Inovasi	300.000.000	Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota	Jawa Barat	Jumlah Inovasi pelayanan Kab/Kota	1 Inovasi	300.000.000	
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan sarana dan	1 kegiatan	657.926.813	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan sarana dan	1 kegiatan	657.926.813	

			prasarana perkantoran					prasarana perkantoran			
12	Pembangunan tembok penahan tanah	Bandung	Terbangunnya tembok penahan tanah	1 kegiatan	202.310.000	Pembangunan tembok penahan tanah	Bandung	Terbangunnya tembok penahan tanah	1 kegiatan	202.310.000	
13	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jawa Barat	Pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional Disdukcapil	12 Bulan	353.678.583	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jawa Barat	Pemeliharaan Kendaraan dinas dan operasional Disdukcapil	12 Bulan	353.678.583	
14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	Jawa Barat	Pengamanan dan pemeliharaan kantor dinas	12 Bulan	1.519.305.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	Jawa Barat	Pengamanan dan pemeliharaan kantor dinas	12 Bulan	1.519.305.000	
15	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Bandung	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	45 Orang	67.746.000	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Bandung	Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	45 Orang	67.746.000	
16	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	Bandung	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	45 Orang	173.400.000	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	Bandung	Meningkatnya jaminan Kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Daerah	45 Orang	173.400.000	
17	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	906.252.591	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan fasilitas Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	906.252.591	
18	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	185.460.996	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Habis Pakai Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	185.460.996	
19	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan berlangganan dan honorarium tenaga teknis non PNS disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	368.884.000	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan berlangganan dan honorarium tenaga teknis non PNS disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	368.884.000	
20	Kegiatan Penyediaan Makan minum dan Akomodasi kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan pada disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	1.846.961.043	Kegiatan Penyediaan Makan minum dan Akomodasi kantor	Bandung	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan pada disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	1.846.961.043	
21	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Jawa Barat	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	224.200.000	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Jawa Barat	Pemenuhan kebutuhan operasional kedinasan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	12 Bulan	224.200.000	
			Jumlah		12.412.951.952					12.412.951.952	

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2020, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi-asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Disdukcapil yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan usulan dari masyarakat tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan yang terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel. T-II.4

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	-	-	-	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 16 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarga-negaraan bagi seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISDUKCAPIL

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;
3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2020 sebanyak 6 Program sebagai berikut :

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Program Penataan Data Kependudukan
4. Program Peningkatan Layanan Dokumen Kependudukan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan dari DAK Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Rp. 4.142.684.000
2. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor sebesar Rp. 368.844.000

3. Kegiatan Penyediaan Makan Minum dan Akomodasi Kantor sebesar Rp 1.846.961.043
4. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor sebesar Rp 224.200.000
5. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis sebesar Rp. 185.460.996
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya sebesar Rp. 1.519.305.000
7. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 353.678.583
8. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor sebesar Rp. 906.252.591
9. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga sebesar Rp. 173.400.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur sebesar Rp. 67.746.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota sebesar Rp. 300.000.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan sebesar Rp. 150.000.000
13. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 200.000.000
14. Kegiatan Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data) sebesar Rp. 263.729.600
15. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PIAK sebesar Rp. 110.000.000
16. Kegiatan Monitoring dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 99.997.000
17. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil sebesar Rp. 130.266.102
18. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 180.000.000
19. Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 184.963.500
20. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 657.926.813
21. Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah sebesar Rp. 202.310.000

Jumlah Belanja Langsung untuk Tahun 2020 berdasarkan pagu indikatif Rp. **12.412.951.952,-** (Dua belas milyar empat ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Tahun 2020				Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Common Goals	Tematik Sektoral	Tematik Kewilayahan	Mitra OPD	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD Provinsi	APBN	Sumber Dana Lainnya						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)
	URUSAN WAJIB												
	Admuduk dan Capil												
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	81,83%									
	Pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (DAK)	Jumlah elemen pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jawa Barat	32 Elemen	4.142.684.000							32 Elemen	4.764.086.600
	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN												
	Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparatur yang mengikuti Rakornis, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion lingkup pendaftaran penduduk	Jawa Barat	178 Orang	180.000.000							178 Orang	207.000.000
	Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Rakornis, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion lingkup pencatatan sipil	Jawa Barat	178 Orang	184.963.500							178 Orang	212.708.025
	Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, FGD, dan Desk Discussion tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pendampingan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jawa Barat	178 Orang	275.492.826							178 Orang	316.816.750

				Monitoring dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah elemen layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Jawa Barat	32 Elemen	99.997.000						32 Elemen	114.996.550
				PROGRAM PENATAAN DATA KEPENDUDUKAN											
				Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	118 Orang	200.000.000						118 Orang	230.000.000
				Sinkronisasi Data Kependudukan (Validasi Data)	Jumlah Elemen Data yang disinkronkan	Jawa Barat	32 Data	263.729.600						32 Data	303.289.040
				Monitoring dan Evaluasi PIAK dan Pemanfaatan Data	Jumlah Elemen Pengelolaan Data Kependudukan dan Elemen Pemanfaatan data Kependudukan yang dimonitoring	Jawa Barat	2 Elemen	110.000.000						2 Elemen	126.500.000
				PROGRAM PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN											
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerja sama pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	5 PKS	150.000.000						5 PKS	172.500.000
				Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota	Jumlah Inovasi pelayanan Kab/Kota	Jawa Barat	1 Inovasi	300.000.000						1 Inovasi	345.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Jawa Barat	1 Kegiatan	657.926.813						1 Kegiatan	756.615.835
				Pembangunan tembok penahan tanah	Terbangunnya tembok penahan tanah	Jawa Barat	1 Kegiatan	202.310.000						1 Kegiatan	232.656.500
				PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan										

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Renja 2020 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2020.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2020 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja 2020 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Renja Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.